



2012

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B 1

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 16 Agustus 2012 No. 66

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)****I. DATA PRIBADI**

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ABDUL LATIEF, S.E., M.M. |
| 2. Jabatan | : AUDITOR -UTAMA -AUDITORAT UTAMA
KEUANGAN NEGARA VI |
| 3. NHK | : 74652 |
| 4. Alamat Kantor | : Jl. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 31, JAKARTA
PUSAT |
| 5. Tanggal Pelaporan | : 4 September 2005, 9 April 2012 |

Status Laporan

	4 September 2005		9 April 2012
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 5.000.000		Rp. 111.130.000
1. Tanah seluas 250 m ² , di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1998 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 5.000.000		Rp. 6.750.000
2. Tanah & Bangunan seluas 170 m ² & 100 m ² , di Kota TANGERANG SELATAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru)	—		Rp. 104.380.000

II. DATA HARTA**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah seluas 250 m² , di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1998 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)
2. Tanah & Bangunan seluas 170 m² & 100 m², di Kota TANGERANG SELATAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru)

Status Laporan

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

	4 September 2005	9 April 2012
	Rp. 67.000.000	Rp. 68.900.000
1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 1995, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1995 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 4.000.000	Rp. 1.000.000
2. Mobil, merk TOYOTA CORONA, tahun pembuatan 1995, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 50.000.000
3. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 12.900.000
4. Motor, merk VESPA, tahun pembuatan 1976, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 5.000.000
5. Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 63.000.000	—

**b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA****c. HARTA BERGERAK
LAINNYA**

	Rp. 27.700.000	Rp. 84.000.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1975 sampai dengan 2008 (Penambahan Data Baru, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 7.500.000	Rp. 42.250.000

74652	Status Laporan	
	4 September 2005	9 April 2012
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 2012 (Penambahan Data Baru, Penghapusan Data Karena Dihibahkan, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 20.200.000	Rp. 41.750.000
C. SURAT BERTHARGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 9.000.000	Rp. 564.146.481
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Penghapusan Data Karena Dikonsumsi, Perubahan Data Karena Penambahan/Pengurangan)	Rp. 9.000.000	Rp. 564.146.481
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 108.700.000	Rp. 828.176.481
III. HUTANG	—	—
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 108.700.000	Rp. 828.176.481

74652

Status Laporan

4 September 2005

9 April 2012

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DEPUTI

Jakarta, 25 Juli 2012
DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
PLH. DIREKTUR

TTD
ISWAN ELMI

TTD
BUDI WALUYA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.